

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH PEKERJA
PENGISIAN NITROGEN KENDARAAN
(Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**YOWANDA SAPUTRA
NPM: 1521030301**

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH PEKERJA
PENGISIAN NITROGEN KENDARAAN
(Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis dalam Islam suatu perjanjian dikenal dengan istilah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Salah satunya ialah akad upah dalam perjanjian pengisian angin ban kendaraan yang terjadi di SPBU Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung, dalam praktik Pengisian angin ban Kendaraan SPBU Urip Sumoharjo ini sudah terjadi ketidaksetiaan upah yang diberikan oleh pemilik gerai green nitrogen terhadap pekerja, hal ini mengakibatkan pekerja merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana praktik akad upah dari jasa pengisian angin ban kendaraan di SPBU Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan dari jasa pengisian angin ban kendaraan di SPBU Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung?. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pengupahan dari jasa pengisian angin ban di SPBU Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung

Jenis penelitian ini adalah penelitian pada lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di SPBU Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung. Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Adapun responden dalam penelitian ini adalah satu pemilik dan dua pekerja SPBU Urip Sumoharjo gerai Green Nitrogen.

Berdasarkan hasil penelitian Praktik Pengisian angin ban Green Nitrogen merupakan Kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Hal ini terdapat perbedaan upah dalam perbulannya. Pada pelaksanaannya berubah karena pemilik pengisian angin ban menganggap tidak adanya keuntungan bila mengikuti kesepakatan awal, jadi sistem pengupahan dirubah dengan menyesuaikan pendapatan Pengisian angin ban. Hal ini membuat kerugian dari salah satu pihak terutama pekerja. Karena kesepakatan awal yang tidak terlaksanakan. Jadi, apabila Pengisian angin ban itu ramai maka pekerja mendapatkan lebih banyak upah, tetapi apabila pengisian angin ban tersebut sepi pekerja mendapatkan upah lebih sedikit. Adapun Tinjauan Hukum Islam Menurut hukum Islam terhadap praktik pengisian angin ban kendaraan yang terjadi di SPBU Urip Sumoharjo ialah tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan tidak ada keridhaan bagi pekerja, sedangkan pemilik Pengisian angin ban ini melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja sehingga mereka merasa dirugikan. Maka hal ini tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam praktik akad pengupahan jasa pengisian. Jadi, akad pengupahan dalam jasa pengisian angin ban ini menggunakan prinsip asas kebebasan berakad, dengan alasan memasukan apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya karena kondisi dan situasi yang membuat pihak pemilik jasa tidak bisa membayarkan upah yang telah disepakati di awal sehingga pemilik membuat keputusan sepihak.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yowanda Saputra
NPM : 1521030301
Program study : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH PENGISIAN ANGIN BAN KENDARAAN (Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Urip Sumoharjo Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung) “** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 11 November 2019

Yang menyatakan

Yowanda Saputra
NPM. 1521030301



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM UPAH PEKERJA PENGISIAN
NITROGEN KENDARAAN (Studi di Gerai
Green Nitrogen Kecamatan Way Halim
Kota Bandar Lampung)**

**Nama : YOWANDA SAPUTRA
NPM : 1521030301
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyahkan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP: 197411062000031002

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i

NIP: 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH PEKERJA PENGISIAN NITROGEN KENDARAAN (Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”**. Di susun oleh: **Yowanda Saputra, NPM : 1521030301, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Diketahui,
Dekan Fakultas Syariah



Khoiruddin, M.H.
NPM. 160210221993031002

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم
فَسْتَزِضْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq : 6)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

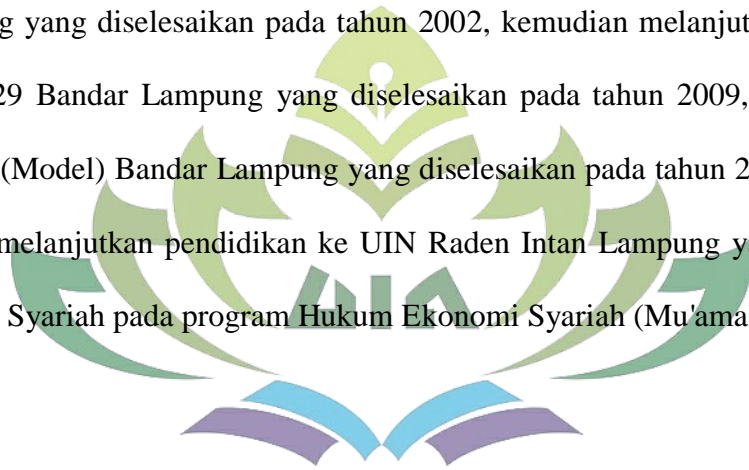
1. Ayahanda M.Rizal terimakasih atas kasih sayang yang berlimbah telah dicurahkan sejak aku didalam Rahim hingga aku sebesar ini.
2. Ibunda Herliyana terimakasih atas limpahan do'a yang tak pernah teputus, sertasemua hal yang telah bunda curahkan semua yang terbaik untuk ananda.
3. Adik terbaik Risa Anjani dan Reza Revaldo yang turut berada dan menanti kesuksesanku.
4. Almamater Tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Yowanda Saputra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 1997 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak M. Rizal dan ibunda Herliyana dengan adek perempuan Risa Anjani dan adek laki-laki Reza Revaldo.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya ke MAN 1 (Model) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung yang diterima di Fakultas Syariah pada program Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pengisian Angin Ban Kendaraan (Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Urip Sumoharjo Gren Nitrogen Kecamatan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung”. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bpk Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Bpk Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
3. Bpk Dr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti, semoga saat-saat indah itu akan menjadi kenangan yang sangat indah.
7. Almamater tercinta .

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt.

Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019
Penulis

Yowanda Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad / Perjanjian	13
2. Dasar Hukum Akad / Perjanjian.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad / Perjanjian	18
4. Macam-macam Akad / Perjanjian	22
5. Asas-asas dalam Akad / Perjanjian.....	28
6. Batal dan sahnya dalam Akad / Perjanjian	31
7. Berakhirnya Akad.....	32
B. Upah-Mengupah	
1. Pengertian Upah	34
2. Dasar Hukum <i>Upah</i>	37
3. Rukun <i>Upah</i>	41
4. Syarat <i>Upah</i>	42
5. Macam-macam Upah.....	48
6. Waktu Pembayaran Upah	49
7. Sistem Pengupahan Dalam Islam	52
C. Tinjauan Pustaka	61

BAB III PENELITIAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengisian Gas Ban di Gerai Green Nitrogen Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	62
B. Pelaksanaan Akad Upah Pengisian Gas Ban di Green Nitrogen Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Penetapan Upah dari Jasa Pengisian Gas Ban di Green Nitrogen Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	74
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Gas Ban di Green Nitrogen Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi Riset
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Wawancara
4. Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pengisian Nitrogen Kendaraan (Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi, maka perlu dijelaskan kata kunci dari judul tersebut, adapun kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam adalah penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mengacu pada tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma sahabat. Atau dapat disebut yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim.¹
2. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 'perangkat unsur yang secara terarut saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas'.²
3. Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.51.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1460

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³ Dengan demikian yang dimaksud pengupahan adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

4. Pengisian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, perbuatan mengisikan.⁴
5. Gas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah zat yang tidak berwarna dan beratnya ringan seperti udara.⁵
6. Ban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda bulat dari karet yang dipasang melingkar pada roda (sepeda, motor, mobil, dan sebagainya).
7. Kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan Hukum Islam terhadap upah dalam jasa Pengisian Gas Ban Kendaraan yang dilakukan di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah pekerja pengisian Gas ban yakni pembayaran upah yang tidak sesuai dengan awal perjanjian.

³ *Ibid.*, h.1533.

⁴ *Ibid.*, h.549.

⁵ *Ibid.*, h.553.

⁶ *Ibid.*, h.669.

2. Secara Subyektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis Islam suatu perjanjian dikenal dengan istilah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditergakkan isinya.

Akad sangat berhubungan erat dengan suatu jasa, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal pengupahan. Adanya pihak pertama sebagai penyedia jasa dan adanya pihak kedua sebagai pelaku jasa dalam hal ini, perjanjian (Akad) dalam hal jasa pengupahan.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut sebagai majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad *ijarah al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia.¹⁹

¹⁹ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dan barang, menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini, penulis membagi *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetap bendanya.²⁰

Dalam hukum Islam telah dijelaskan syarat sahnya *ijarah* dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat dengan jelas di sini adalah jenis-jenis pekerjaannya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya.²¹

Banyak usaha yang mana pengupahan karyawannya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di mana karyawan bekerja setiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaan akan diberikan perhari, atau perminggu, atau juga perbulan, dengan nilai yang tetap tanpa memilih seberapa besar kontribusi dalam melakukan usaha tersebut atau pelayanan tersebut.

Pada praktik akad yang terjadi di pengisian Gas ban kendaraan Gerai Green Nitrogen, Way Halim, Bandar Lampung ini adanya perubahan akad di awal dengan praktik yang sudah berjalan. Permasalahannya pihak Pengisian Gas ban tidak mengkonfirmasi kepada pekerja apabila upah yang diberikan

²⁰ *Ibid.*, h. 122.

²¹ *Ibid.*, h.126.

mengalami penurunan dari kesepakatan kedua belah pihak. Pada kesepakatan di awal upah yang diberikan sebulan sebesar Rp.1.200.000,-, tetapi di saat pelanggan sepi dan pendapatan perbulannya menurun, upah yang diberikan juga tidak sesuai yaitu Rp.900.000,-. Dalam praktik di pengisian Gas ban Kendaraan Gerai Green Nitrogen ini sudah terjadi ketidaksetiaan upah yang diberikan oleh pemilik Pengisian Gas ban terhadap pekerja Pengisian Gas ban, hal ini mengakibatkan pekerja Pengisian Gas ban merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik akad dalam pengupahan jasa Pengisian Gas ban tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pengisian Nitrogen Kendaraan (Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).**

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem upah pengisian Gas ban. Karena ada masalah pada pengupahan, peneliti akan difokuskan pada sistem upah pengisian Gas ban studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya yaitu:

1. Bagaimanakah praktik akad pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan dari upah pekerja pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akad pengupahan dari upah pekerja pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan dari upah pekerja pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara Teoritis, Agar dapat menambah wawasan penulis maupun bagi masyarakat dan tentunya untuk para pengguna kendaraan tentang pengisian Gas ban dan pandangan hukum Islam tentang upah jasa pengisian Gas ban tersebut.
- b. Secara Praktis, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan upah pengisian Gas ban tersebut.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan pengisian Gas ban kendaraan, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif sebab penelitian ini tentang riset yang bersifat deskriptif analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan,

wawancara, dan dokumentasi.⁷ Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang praktik akad pengupahan yang terkhususkan pada pekerja dan pemilik pengisian Gas ban kendaraan di Gerai Green Nitrogen.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.⁸ Dalam hal ini untuk mengetahui masalah pelaksanaan praktik akad upah dari jasa pengisian Gas ban kendaraan di Gerai Green Nitrogen dengan cara melakukan analisis terhadap akad dan upah dari jasa pengisian Gas ban kendaraan di Gerai Green Nitrogen tersebut.

3. Patisipan dan Tempat Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.⁹ Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, di mana berisi data tentang pengalaman pemilik dan pekerja di Gerai Green Nitrogen. Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.¹⁰ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh pemilik SPBU dan pekerja, hasil dari observasi melihat secara langsung bagaimana praktik akad upah dari jasa pengisian Gas ban

⁷Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006),h,50-51.

⁸Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012),h. 34.

⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta,2006), h.51.

¹⁰Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 27.

kendaraan di Gerai Green Nitrogen. Dan hasil dari dokumentasi seperti buku-buku maupun catatan yang terdapat di Gerai Green Nitrogen.

Data primer bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain al-Qur'an, al-Hadis, bahan-bahan bacaan, dokumentasi, dan pengamatan secara langsung.¹¹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa :

- a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹² Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap pemilik dan pekerja Gerai Green Nitrogen.
- b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹³ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung kepada pemilik dan penyewa yang telah melakukan akad pengupahan pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen.

¹¹Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹²Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-9 (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h.70.

¹³Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*(Jakarta: Raja Wali, 1992), h. 133.

- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, Transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁴ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data tentang upah-mengupah pengisian Gas ban. Diperlukan juga metode documenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.

5. Prosedur Analisis Data

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.¹⁵

Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur'an, Hadist dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

b. Induktif

Metode induktif yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat

¹⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h.187.

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.51.

husus”.¹⁶ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.¹⁷

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.¹⁹

b. *Coding*

Yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda simbol atau kata tertentu yang

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), h.10.

¹⁷*Ibid.*, h.11.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h.28.

¹⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*(Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132.

menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁰

c. Analizing

Yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait sistem upah pengisian Gasa ban kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.



²⁰Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 53

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.¹⁹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syariat yang ada pada obyek perikatan.

Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*Ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*), yaitu siapa saja yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.²⁰

Al-Aqad dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain,

¹⁹Abdur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (Al-Adalah Vol. XIII.No. 2, Desember 2016), h.180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (10April 2019, pukul 20.30),dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁰M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003),h.101.

baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.²¹

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²²

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad yang berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²³ Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h. 106.

²² Abdullah Al-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h. 26.

²³ Ascarya, *Akada dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

Pengertian akad menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Nazih Hammad mengartikannya kepada dua makna *pertama*, yaitu menghubungkan dua ucapan seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara'. *Kedua* yaitu tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seseorang atau lebih.¹
- b. Menurut Abu Zahrah mendefinisikan akad yaitu menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak.²
- c. Menurut al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah mengartikan akad kepada dua makna yaitu makna umum dan khusus. *Pertama*, makna umum yaitu setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad manusia tentang suatu urusan yang akan dilakukannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan. Berdasarkan arti umum akad sebagaimana disebutkan diatas, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad mu'awadhah lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terkait dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya. *Kedua*, makna khusus dapat dipahami bahwa akad adalah setiap tindakan yang timbul dari kehendak kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab kabul. Dengan demikian kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.³

¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),

²*Ibid.*, h. 37.

³*Ibid.*, h.38-39.

d. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh yang dikutip oleh Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁶

Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad atau perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksi adanya hak dan

⁴Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*..... h.785-806.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.340.

khiyar untuk membeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan.²⁷

b. Surat Ali Imran (3) ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji, yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁸

Maksud akad di atas yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela aka nisi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan dikemudian hari.²⁷

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 83.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.140.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h. 2-3.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun berasal dari kata mufrad dari kata jama *arkaa*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan).⁵ Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*'aqid*), objek yang dijadikan akad (*maqud 'alaih*), serta ungkapan ijab dan kabul (*shighat*).⁶ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain *shighat* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan. Artinya *shighat* tidak sah jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*'aqid*) dan objek akad (*maqud 'alaih*).⁷

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁸

⁵M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.30.

⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.45.

⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*....., h.13.

⁸ *Ibid.*, h. 14

Rukun akad terbagi menjadi beberapa rukun yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dan gadai.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al-'Aqd* ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad dan diucapkan setelah adanya ijab.⁹

b. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.

⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah.....*, h, 47-48.

- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut jalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.¹⁰

Setiap pembentukan akad syarat yang ditentukan syara; yang wajib disempurnakan. Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in-‘iqad*)

Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Terbilang¹¹

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu:

- 1) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat.
- 2) Kesatuan majelis akad¹²

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 99.

¹¹ *Ibid.*, h. 100

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas –Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Cet Ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.32.

Rukun ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Objek itu dapat diserahkan.
- 2) Tertentu atau dapat ditentukan.
- 3) Objeknya dapat ditransaksikan.

b. Syarat keabsahan akad (*syurut ash-shihhah*)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar'i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnyanya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku kebanyak akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.¹³

c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)

Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat terbentuk syarat-syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad

¹³ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.40-41.

sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.¹⁴

d. Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*)

Pada dasarnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idla'fiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya *ta'liq* dalam aqad *mua'awadlah* dan aqad *tamalik* seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat *idla'fiyah*.¹⁵

4. Macam-macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan beberapa dalam variasi jenis-jenis akad, diantaranya yaitu:

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Pernjanjian Syariah ...*, h. 101.

¹⁵ *Ibid.* h. 104.

- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Selain *aqad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:¹⁷

- a) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian :
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - 2) Akad *ghair musammah*, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.¹⁸
- b) Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian :
 - 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 47.

¹⁷ *Ibid.*, h. 48.

¹⁸ Ardiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.

- 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.¹⁹
- c) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - 1) Akad *Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya. Baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.²⁰
- d) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - 1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- e) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti pada akad pada umumnya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 48.

²⁰ Ardiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*.....h.67.

f) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- 2) Akad *mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan

g) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:²¹

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsure mencari motif.

- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.²²

h) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Akad *Sahih*, yaitu akan yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

- 2) Akad *Faid*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 72.

²² *Ibid.*, h. 73.

tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan bertahan untuk sementara)

- 3) Akad *Bathal*, yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harta atau uang) dan benda kepada kedua belah pihak.²³

i) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

- 1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

- 2) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini di buat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak terentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan

²³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.93

masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.²⁴

j) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

Akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad *asesoir* (*al-'aqd at-tab'i*).

1) *Al-'aqd al-ashli* adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena diri sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

2) *Al-'aqd at-tab'i* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, “*suatu yang mengikuti*” (*at-tabi; tabi*). Artinya perjanjian *Asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikut perjanjian pokok tersebut.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h.93

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*h.74.

- k) Akad dari segi unsure tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al-‘aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-‘aqd al-fauri*).²⁶

5. Asas-asas dalam Berakad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, fondasi, bangunan, asal, pangkal dan prinsip-prinsip.²⁷ prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada delapan asas berakad dalam Islam, yaitu asas *ilahiah*, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiah* atau asas *tauhid*.²⁸ Asas *ilahiah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.²⁹

1) Asas *Ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab

²⁶*Ibid.*, h. 75

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

²⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 30.

²⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2004), h. 125.

kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah swt.

2) Asas Kebebasan Berakad

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) atau bisa juga diartikan sebagai suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.³⁰

3) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³¹

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqh*, "perintah pada dasarnya

³⁰ Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 40

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 87.

menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi.³²

5) Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.³³

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan³⁴

7) Asas Kerelaan

Asas ini dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (*al-aqd bi bathil*).³⁵

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an.³⁶

³² *Ibid*, h. 89.

³³ *Ibid*., h. 90.

³⁴ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 94

³⁵ *Ibid*., h. 95.

³⁶ *Ibid*., h. 95.

6. Batal dan Sahnya Akad

Meskipun sudah terbentuk akad, tetapi belum menjadi sah, apabila belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- a. Bebas dari *gharar*.
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
- c. Bebas dari syarat-syarat fasid.
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban.³⁷

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:

- a. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek).
- b. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.³⁸

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu:

- a. Akad *batil*.
- b. Akad *fasid*.
- c. Akad *maukuf*.
- d. Akad *nafiz gair lazim*.
- e. Akad *nafiz lazim*.³⁹

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), h. 56.

³⁸ *Ibid.*, h. 56.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut diatas dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu:

- a. Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid.
- b. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad nafidz gair lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad nafidz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh).⁴⁰

7. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan), atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Karena *di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

³⁹ *Ibid.*, h.56.

⁴⁰ *Ibid.*, h.56.

- b. Karena dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah fasakh.
- c. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran penjual mengatakan, bahawa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- g. Karena kematian.⁴¹

⁴¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*....., h. 99.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut *al-Ijarah*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.⁴²

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁴³ Oleh karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.⁴⁴ Sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁵

⁴² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.228.

⁴³ Sohari sahrani dan ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.29.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

Upah juga sering disebut dengan *Ijarah 'ala al-a'mal*, ialah “sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan”.⁴⁶

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁴⁷ Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham” *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.⁴⁸

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁴⁹ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang terdapat dalam *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syari'at. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *mu'jir* sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *musta'jir* dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*, serta

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h.55.

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.231.

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

⁴⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan).⁵⁰

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁵¹ Pada dasarnya *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.⁵² Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah guna

⁵⁰ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216

⁵² Helmi Karim, *Fiqh MUamalah*..... h.30.

memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.⁵³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁴

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Ijma.

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

Surat Ath- thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” Qs. Ath-Thalaq [65] : 6

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....*, h.217.

⁵⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.⁵⁵

Surat An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:”barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan” Q.S An Nahl (16) : 97

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Surat Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”Qs. Al-Baqarah [2] : 233

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan.⁵⁶

b. Dasar hukum hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَاعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلُنَا هُ الْمُذَارَعَةَ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُزَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِأَمْوَاجِرَةٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

Artinya: dari Abdullah bin Sa'ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma'qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah? Maka jawabnya:”Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.118.

⁵⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

⁵⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), h.637.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالَقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَا سَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. (HR. Bukhari).⁵⁹

c. Dasar hukum *ijma’*

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁶⁰ Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain.

Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan

⁵⁹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... h.320.

agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kessulitan dalam kehidupan manusia.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwav transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁶²

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

1) *A'qid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁶³

2) *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....*, h.217.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah.....*,h.117.

Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

3) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

4) *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.⁶⁴

b. Syarat upah (*ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan

⁶⁴ *Ibid.*, h.118.

bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.⁶⁵

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syturut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*Syurut al-sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁶⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٦٨}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁶⁸ Qs. An- Nissa [4]: 29

⁶⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*..... h.34-35.

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106.

⁶⁷ *Ibid.*, h.35.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.....h.83

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁹ Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudakny sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁷⁰

b. Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.⁷¹

c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau

⁶⁹ Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁷⁰ Wabah zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu*h. 84

⁷¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dalil ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syara' tidak boleh dipenuhi.⁷²
- e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setia mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- f. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam

⁷² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..... h.108.

Islam.⁷³ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.⁷⁴
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.⁷⁵
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (di-*ghasab*), kecuali upah diberikan kepada

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

⁷⁴ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

⁷⁵ *Ibid.*, h.160.

orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.

- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁷⁶
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁷⁷

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu.

⁷⁶ *Ibid.*, h.161.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*..., h. 326.

Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Al- Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang *qafiz al-thahan*. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri.⁷⁸

Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini.

- 1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- 2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya di upah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- 3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.⁷⁹

Ketiga jenis *ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa

⁷⁸ *Ibid.*, h.327.

⁷⁹ *Ibid.*, h.328.

mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.⁸⁰

- 6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaihi* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.⁸¹ Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁸²

1. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka

⁸⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Muamalah*....., h.162.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich., *Fikih Muamalah*.....h.326.

⁸² *Ibid.*, h.367.

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁸³

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguk, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁸⁴

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁸⁵ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

⁸³ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.20.

⁸⁵ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam*..... h.141.

Artinya: *Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,*

“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

(HR. Ibn Majah).⁸⁶

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan *nilai dan moral dalam perekonomian Islam* menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁸⁷ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dala suatu hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَا مِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه

البخارى)

⁸⁶ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*...., h.816.

⁸⁷ Idri, *Hadis Ekonomi*, h.222.

Artinya: Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya”. (H.R. al-Bukhari).⁸⁸

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁸⁹

2. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁹⁰

⁸⁸ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*....., h.529.

⁸⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, h.223.

⁹⁰ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h.71.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,⁹¹ kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah:



 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 Artinya: “....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....” Qs. Al-Baqarah[2]:279

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya

⁹¹ Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2....* h.362

mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsitah:⁹²

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”. Qs. Al Jaatsiyah [45]:22.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan

⁹² *Ibid.*, h.363.

kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf

وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan. Qs. Al Ahqaf [46]: 19.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁹³ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:⁹⁴

a. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁹⁵ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

⁹³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h.227.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 229

⁹⁵ *Ibid.*, h.229.

b. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

c. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

d. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*, h.230.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.⁹⁷

b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja⁹⁸

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

⁹⁷ Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.313.

⁹⁸ *Ibid.*, h.315.

Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.⁹⁹

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan

⁹⁹ *Ibid.*, h.316.

dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.¹⁰⁰

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.* Qs. Thahaa[20]: 118-119

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi dahag (kebutuhan) terhadap pendidikan dan

¹⁰⁰ Atzahir Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2.*, h..365.

pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum adatingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.¹⁰¹

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta'aruf hidup pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang sedikit-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

¹⁰¹ Atzahur Rahman, *Doktrin Ekonomi Jilid 2.....*, h. 366.

Artinya: *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”* Qs. An-Najm[27]: 39

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntutan dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.¹⁰²

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang sistem upah pengisian Gas ban di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sejauh ini belum pernah dilakukan. Termasuk penelitian tentang sistem upah pengisian Gasa ban di daerah lain pun sebelumnya belum pernah ada. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan sistem upah pengisian Gas ban dengan skripsi-skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya bias di lihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya :

¹⁰² Atzahur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Julid 2.*, h.374.

1. Skripsi yang ditulis oleh Deni Susanto, NPM : 1321030039, Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”.¹⁰³ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan bagai mana pemotongan gaji karyawan sebagai dasar pemotongan gaji karyawan. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang status pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan. Adapun Dasar dari pemsil dari penelitian ini adalah potongan upah gaji karyawan yang diakibatkan hilangnya barang adalah perjanjian kerja didalamnya memuat tentang hubungan kerja dan katyawan mengenai tatacara, upah, hak dan kewajiban dan aturan lain yang berlaku diperusahaan. Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas maksimal maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya. Tinjauan hukum Islam pemotongan gaji akibat hilangnya barang perusahaan itu tidak boleh diberlakukan. Ada ahli Fiqih melarang denda disebabkan barang rusak dalam waktu bekerja bukan karena kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang oleh karyawan tertuang dalam perjanjian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Resti Carlina, NPM : 1421030160, Mahasiswi S1 jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan

¹⁰³ Deni Susanto, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)*”, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

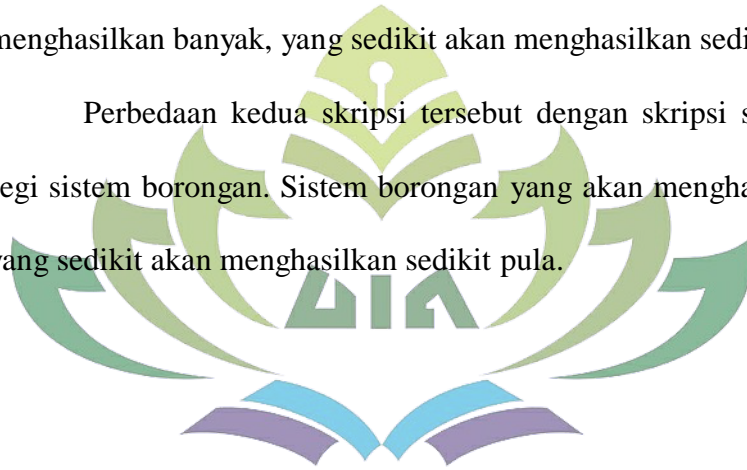
Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA dan Pengisian Gas ban Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung)".¹⁰⁴ penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme pengupahan karyawati pada SPA Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung dan Untuk mengetahui sistem pengupahan karwati SPA dan Pengisian Gas ban Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme pengupahan di SPA dan Pengisian Gas ban Muslimah Az- Zarah di Bandar Lampung belum menjalankan ketentuan upah mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah yang mengharuskan suka sama suka dan belum, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya" adalah memberikan hak kepada pekerja yang telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Dan belum memeperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk menerima upah setelah melakukan kewajibannya, seperti datang ketempat kerja dan tidak diberikan upah. Disamping itu pada SPA pengisian Gas ban muslimah Az-Zahra ini belum bergerak tanpa aturan yang berlaku. Sistem pengupahan karywati SPA pengisian Gas ban muslimah Az-Zahra ditinjau dari fiqih muamalah menggunakan sistem borongan. Dimana setiap pekerja diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama halnya

¹⁰⁴ Lia Resti Carlina "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA dan Pengisian Gas ban Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung)", Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

dengan sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit.

Dari kedua skripsi tersebut ada persamaan masalah dengan skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pengisian Gas Ban Kendaraan (Studi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung) yaitu sama-sama adanya setiap pekerja diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama halnya dengan sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit.

Perbedaan kedua skripsi tersebut dengan skripsi saya yaitu dari segi sistem borongan. Sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit pula.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Mushlih dan shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq 2008.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ascarya *Akada dan Produk Bank Syariah..* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam..* Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: PT Sinar Grafika,1994),h. 56.
- Departemen Agama RI Al-Quraan dan Terjemah. Semarang: CV As-syifa, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamaah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman .*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadari Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2004.
- Heidjrahman Suad Husnan.*Manajemen Personalia*.Yogyakarta L Universitar Gajah Mada Press. 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ibnu Hajar Al Asqolani. *Bulughul Maron Min Adilatil Ahkam*. Jakarta : Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

- Izzan Ahmad. *Referensi Ekonomi syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Ali hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Mardani. *fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Nurhayati, M.Ag. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad . *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sohari Sahari. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Permanet. 2015.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Jurnal

- Abdur Rohman. Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (Al-Adalah Vol. XIII.No.2,Desember 2016), h.180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (10April 2019, pukul 20.30), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Vol. 14, No.2 (Online). Tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909> (Januari 2017), h. 491-492.

Wawancara

Wawancara dengan pekerja gerai pengisian angin ban, 24 September 2019.

Wawancara dengan pekerja pengisian angin ban, 24 September 2019

Wawancara dengan pemilik gerai green nitrogen, 24 September 2019.

